Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia
www.journal.uii.ac.id/index.php/jaai

Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak

Widya Hidayati[1], Vera Diyanty[2]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
e-mail: [1] widyahidayati1994@gmail.com, [2] vera.diyanti@ui.ac.id

ARTIKEL INFO

Article history:
Available online

Keywords:
Family ownership, political connection, ETR, CETR

DOI:
https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5

ABSTRACT

The study aims to prove moderating effect of political connection to family ownership and how it affects corporate tax aggressiveness. This research contain all non-financial listed companies on Indonesia Stock Exchange from 2010 to 2013 by using purposive sampling method and regression for data analysis. Tax aggressiveness is measured through Effective Tax Rate (ETR) and Current Effective Tax Rate (CETR). The results show that family ownership negatively affects corporate tax aggressiveness and moderation of political connections will weaken the negative effects of family ownership. The result of this study proven that ownership characteristics and political connection can be used by Directory of General Tax (DGT) to measure the risk of company involvement in tax aggressive activities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. Objek penelitian meliputi seluruh perusahaan publik *non-financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai 2013 dengan metode *purposive sampling* dan pengolahan data menggunakan metode regresi. Agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur melalui *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Current Effective Tax Rate* (CETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan efek moderasi koneksi politik akan memperlemah pengaruh negatif dari kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menggunakan karakteristik kepemilikan dan koneksi politik perusahaan dalam menentukan risiko perusahaan terlibat kegiatan manajemen pajak agresif.

Pendahuluan

Dalam publikasi World Bank tahun 2012 disebutkan bahwa realisasi pendapatan pajak di Indonesia berkisar pada angka 12% dengan potensi realisasi mencapai 16% (Amir, 2014). Menteri Keuangan Indonesia, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa rendahnya realisasi pajak di Indonesia disebabkan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak termasuk wajib pajak badan. Penelitian Chen et al. (2010) menyebutkan bahwa pajak merupakan komponen biaya besar dalam perusahaan tanpa kontribusi langsung dan juga mengurangi ketersediaan arus kas bagi perusahaan dan pemegang saham sehingga memunculkan insentif bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak melalui manajemen pajak agresif. Manfaaat dari kegiatan manajemen pajak agresif yaitu berupa penghematan pajak dan *rent extraction*. Meski demikian Chen et al. (2010) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa manajemen pajak agresif merupakan kegiatan kompleks dan berisiko menimbulkan potensi kerugian berupa denda dan rusaknya nama baik perusahaan. Oleh karena itu, keputusan perusahaan untuk melakukan kegiatan manajemen pajak agresif atau tidak harusnya mempertimbangkan potensi manfaat dan biaya yang timbul dari kegiatan ini (Chen et al., 2010).

Penelitian Desai & Dharmapala (2006) dan Shackelford & Sheclin (2001) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manfaat dan biaya kegiatan manajemen pajak agresif, salah satunya yaitu bentuk kepemilikan dalam perusahaan. Bentuk kepemilikan akan mempengaruhi tipe masalah keagenan yang muncul dalam perusahaan. Masalah keagenan ini nantinya dapat meningkatkan atau menurunkan manfaat dan biaya dari melakukan kegiatan manajemen pajak agresif sehingga mempengaruhi perilaku perpajakan perusahaan (Desai &

P ISSN 1410-2420 | E ISSN 2528-6528
Copyright @ 2018 Authors. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0/)

Dharmapala 2006). Secara umum, bentuk kepemilikan dalam perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kepemilikan tersebar dan kepemilikan terkonsentrasi (La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer 1999).

Peneitian La Porta, Lopez-de-Silanes, dan Shleifer (1999) menyebutkan bahwa sebagian besar kepemilikan perusahaan di luar US memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (terpusat). Hal ini didukung oleh penelitian Claessens, Djankov, & Lang (2000) dan Camey & Child (2013) yang menemukan bahwa struktur kepemilikan di Asia Timur, cenderung terkonsentrasi dengan keluarga sebagai pemilik ultimat. Indonesia, dari sembilan negara yang diteliti oleh Claessens, Djankov, dan Lang (2000) merupakan negara dengan pola konsentrasi kepemilikan keluarga terbesar dimana berdasarkan penelitian Diyanty (2012) lebih dari 50% pengendalian perusahaan di Indonesia dimiliki oleh keluarga sebagai pemilik ultimat dan diperoleh melalui struktur kepemilikan piramida.

Pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi terjadi pergeseran konflik kepentingan dari konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen menjadi konflik kepentingan antara pemegang saham minoritas dan mayoritas (Sheleifer & Vishny, 1997). Pemegang saham mayoritas akan mampu mengarahkan kebijakan perusahaan untuk mencapai kepentingannya meskipun harus mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas yang dikenal sebagai tindakan ekspropriasi. Insentif tindakan ekspropriasi yang terjadi akan semakin meningkat apabila kepemilikan diperoleh melalui rantai kepemilikan piramida seperti di Indonesia.

Ariffin, Nor, dan McGowan (2010) mendefinisikan struktur piramida sebagai kelompok usaha yang memiliki struktur kepemilikan berupa rantai pengendalian. Pada kepemilikan yang diperoleh melalui mekanisme kepemilikan piramida akan muncul perbedaan antara hak arus kas dengan hak kendali (Claessens et al., 2000; Diyanty, 2012). Perbedaan hak kendali dan hak arus kas ini akan mendorong munculnya efek *entrenchment* yang diwujudkan melalui tindakan ekspropriasi yang salah satunya dilakukan melalui kegiatan manajemen pajak agresif (Bukart, Panurazi, & Shleifer, 2003).

Di satu sisi, pola kepemilikan Indonesia yang dibagun menggunakan struktur kepemilikan piramida akan meningkatkan insentif dan manfaat untuk melakukan tindakan pajak agresif, namun di sisi lain kepemilikan yang didominasi pihak keluarga menimbulkan kenaikan biaya akibat kegiatan manajemen pajak agresif. (Cheng, 2014) menjelaskan terdapat beberapa keunikan dari pihak keluarga, salah satunya horizon waktu investasi yang lebih tinggi dengan investasi yang tidak terdiversifikasi yang menyebabkan pihak keluarga lebih sensitif terhadap isu jangka panjang dan cenderung akan menyelaraskan kepentinganya dengan kepentingan pemegang saham lainnya (Anderson & Reeb, 2003; Cheng, 2014; Chi, Hung, Cheng, & Lieu, 2014). Keunikan lain pihak keluarga yaitu pihak keluarga cenderung menjaga reputasi 'nama keluarga' karena menganggap bahwa perusahaan merupakan kekayaan yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya (Gomez-Meija, Haynes, Nunez-Nickel, Jacobson, & Moyano-Fuentes, 2007). Karakteristik-karakteristik ini menimbulkan kenaikan biaya atas kegiatan yang dapat merusak nama dan citra perusahaan seperti kegiatan manajemen pajak agresif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2010), Badertscher, Sharon, dan Rego (2013); dan Masripah (2014) ditemukan bahwa biaya yang timbul akibat kegiatan manajemen pajak agresif lebih besar dibanding manfaat yang didapatkan pada perusahaan keluarga. Meski demikian, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) menunjukkan hasil yang berkebalikan. Dalam penelitiannya, Sari (2010) menjelaskan bahwa salah satu kemungkinan yang menyebabkan perusahaan keluarga cenderung lebih agresif dalam melakukan manajemen pajak dibanding perusahaan non-keluarga di Indonesia yaitu karena rendahnya kemungkinan perusahaan terkena sanksi pajak. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kemungkinan terkena sanksi perpajakan menjadi rendah, salah satunya yaitu tingkat koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Kim dan Zhang (2016) menyebutkan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan dapat melindungi perusahaan dari risiko deteksi tindakan pajak agresif. Adanya keuntungan dari memiliki koneksi politik ini akan meminimalkan biaya yang muncul dari melakukan kegiatan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan *political power theory* yang diajukan oleh Siegfried (1972). Selain itu, Morck, Stangeland, dan Yeung (2000) dalam penelitiannya menemukan kecenderungan perusahaan perusahaan keluarga untuk membangun koneksi politik dalam rangka mengakomodir kebutuhan perusahaan. Hal ini disebabkan karena koneksi politik ini dipercayai oleh pihak keluarga akan mengurangi risiko dari bisnis dan meningkatkan kemungkinan perusahaan memperoleh manfaat di pasar.

Di Indonesia kedekatan antara pelaku bisnis dengan pemerintah cukup tinggi, dimana .terdapat fenomena payung politik dimana para pebisinis sengaja membina koneksi politik untuk 'memayungi' atau mengamankan dan memudahkan akses bisnis mereka termasuk dalam kepentingan perpajakan perusahaan. Hasil penelitian Diyanty (2012) yang menyatakan bahwa mayoritas pengendalian di Indonesia dimiliki oleh pihak keluarga juga menambah kecurigaan bahwa perusahaan di Indonesia sengaja membina koneksi politik demi mengakomodir kepentingan perusahaan termasuk di dalamnya kepentingan perpajakan perusahaan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Martinez dan Ramalho (2014) mengenai peran kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak di Brazil. Berbeda dengan penelitian Martinez dan Ramalho

(2014) penelitian ini memasukkan variabel moderasi berupa koneksi politik yang juga merupakan kontribusi dari penelitian ini. Koneksi politik diketahui merupakan sesuatu yang lazim ditemui di Indonesia dan diyakini mempengaruhi perilaku perpajakan perusahaan (Wu et al. 2012; Adhikari, Derashid, & Zhang 2006; Kim & Zhang 2016). Selain itu, penelitian terdahulu juga menemukan kecenderungan perusahaan dengan kepemilikan keluarga, yang merupakan bentuk kepemilikan paling umum di Indonesia berdasarkan penelitian Claessens, Djankov, & Lang (2000) dan Diyanty (2012), untuk membangun koneksi politik dalam rangka mengakomodasi kepentingan perusahaan (Cheng 2014; Morck, Stangeland, & Yeung 2000). Dengan demikian, terlihat bahwa terdapat potensi bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi hubungan kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak perusahaan. Meski demikian, berdasarkan hasil telaah literatur yang dilakukan sampai saat ini belum ada penelitian yang menguji pengaruh moderasi dari koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moderasi dari koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak perusahaan di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan pola kepemilikan terkonsentrasi pada pihak keluarga sebagai pengendali utama dimana pihak keluarga akan cenderung membangun koneksi politik untuk mengurangi risiko bisnis seperti risiko terdeteksinya kegiatan manajemen pajak agresif perusahaan (Diyanty 2012; Morck, Stangeland, & Yeung 2000). Kontribusi teoritis dalam penelitian ini adalah penelitian ini berkontribusi dalam rangka memberikan perspektif baru bahwa interaksi kepemilikan keluarga dan koneksi politik akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh regulator untuk mengevaluasi peraturan dan penegakan hukum atas perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan keluarga dan koneksi politik. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu pemeriksa pajak dalam menentukan risiko suatu perusahaan terlibat dalam kegiatan manajemen pajak agresif.

Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Teori Keagenan

Teori keagenan muncul akibat adanya penyerahan wewenang dari pemegang saham (*principal)* kepada manajer *(agent)* dalam menjalankan operasional perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Terdapat dua jenis masalah keagenan yang dapat terjadi, yaitu masalah keagenan tipe I yang melibatkan antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen) dan masalah keagenan tipe II yang melibatkan antar pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Pada perusahaan dengan struktur kepemilikan tersebar seperti di US dan Inggris, masalah keagenan yang muncul adalam masalah keagenan tipe I (La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer 1999). Tidak adanya kepemilikan yang signifikan yang dimiliki masing-masing pemegang saham menyebabkan rendahnya insentif bagi pemegang saham untuk melakukan pengawasan efektif kepada manajemen sehingga manajemen dapat dengan bebas menggunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan kepentingannya meski berlawan dengan kepentingan pemegang saham. Sedangkan masalah keagenan tipe II umumnya terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi pada suatu orang, golongan, atau kelompok tertentu (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 2000).

Pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, terdapat satu orang atau kelompok yang mampu mengendalikan perusahaan melalui hak suara yang didapatkan dari investasinya pada saham perusahaan sehingga mampu melakukan *alignment* dengan manajemen perusahaan. Persentase kepemilikan yang besar ini juga memberikan insentif bagi pemegang saham mayoritas untuk melakukan pengawasan yang efesien. Di pihak lain, kontrol yang dimiliki pemegang saham mayoritas sering kali digunakan untuk mengarahkan keputusan perusahaan untuk mencapai kepentingan pemegang saham mayoritas baik dengan atau tanpa merugikan pemegang saham minoritas. Penelitian Desai dan Dharmapala (2006) menemukan perubahan preferensi perusahaan dengan permasalahan agensi tipe II terhadap tindakan berisiko seperti agresivitas pajak. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai masalah keagenan yang terjadi dalam struktur kepemilikan terkonsentrasi dan bagaimana kepemilikan ini akan mempengaruhi tindakan perpajakan perusahaan.

Struktur Kepemilikan dan Struktur Kepemilikan di Indonesia

Struktur kepemilikan perusahaan mempengaruhi tidak hanya permasalahan agensi yang dihadapi perusahaan namun juga perilaku perusahaan. La Porta, Lopez-de-Silanes, dan Shleifer (1999) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem hukum suatu negara akan mempengaruhi bentuk struktur kepemilikan di negara tersebut. Ia menemukan negara dengan sistem hukum *common law* cenderung memiliki struktur kepemilikan yang tersebar, sedangkan pada negara dengan sistem hukum *civil law* seperti Indonesia cenderung memiliki struktur kepemilikan

yang terkonsentrasi. Hal ini disebabkan perlindungan investor pada negara dengan sistem hukum *common law* lebih tinggi akibat pengimplementasian peraturan yang tidak hanya berdasarkan undang-undang dan peraturan tertulis yang ada sehingga meminimalkan risiko tindakan ekspropriasi yang belum pernah diatur sebelumnya (La Porta et al., 1999). Implikasi dari diterapkannya sistem hukum *common law* yaitu pihak pengendali memiliki rasa takut yang lebih untuk melakukan tindakan ekspropriasi sehingga muncul disintensif untuk mengendalikan suatu perusahaan sehingga pemegang saham pada negara dengan sistem hukum *common law* cenderung melakukan diversifikasi.

Diyanty (2012) menyebutkan terdapat dua cara untuk memperoleh kepemilikan suatu perusahaan yaitu melalui mekanisme kepemilikan langsung atau piramida. Dalam mekanisme kepemilikan langsung, pengendalian diperoleh dengan membeli secara langsung saham perusahaan yang menyebabkan hak arus kas sama dengan hak suara yang dimiliki (Claessens et al., 2000). Sedangkan menggunakan mekanisme kepemilikan piramida, kepemilikan diperoleh bukan hanya melalui pembelian langsung saham namun juga melalui kepemilikan dari perusahaan lain yang berafiliasi (Diyanty, 2012).

Kepemilikan piramida memungkinkan pihak pengendali untuk memiliki hak suara yang lebih tinggi dibanding hak arus kasnya (Claessens, Djankov, & Lang 2000). Hak suara yang lebih tinggi dibanding hak arus kas membuat risiko yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas menjadi lebih rendah, mengingat risiko finansial yang direpresentasikan oleh hak arus kas lebih rendah dibanding kontrol yang didapat di perusahaan (La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer 1999; Claessens, Djankov, & Lang 2000). Hal ini selanjutnya akan memunculkan insentif untuk melakukan ekspropriasi yang sering disebut sebagai *negative entrenchment effect* dari kepemilikan terkonsentrasi dan juga merupakan cikal dari munculnya konflik agensi tipe II pada perusahaan.

Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi dengan pihak keluarga seperti di Indonesia, terbentuk tidak hanya efek *entrechment* namun juga efek *allignment*. Cheng (2014) menjelaskan bahwa terdapat beberapa ciri unik pihak keluarga yang membedakan pihak keluarga dengan investor lainnya yaitu investasi yang tidak terdiversifikasi dengan *time horizon* yang panjang (Cheng, 2014). Panjangnya *time horizon* yang dimiliki membuat pihak keluarga cenderung menghindari kegiatan berisiko seperti kegiatan ekspropriasi, mengingat kegiatan ini akan menimbulkan efek jangka panjang (Chen et al., 2010). Selain itu, ciri lainnya dari pihak keluarga adalah tingginya keperdulian pihak keluarga akan citra dan nama baik perusahaan yang disebabkan karena pihak keluarga memandang kepemilikan yang mereka miliki sebagai aset yang akan diwariskan kepada generasi penerus (Cheng, 2014). Hal ini menyebabkan pihak keluarga cenderung menyelaraskan keinginannya dengan keinginan pemegang saham lainnya demi menghindari risiko terpangkasnya nilai perusahaan akibat adanya kegiatan ekspropriasi dan dikenal sebagai efek *allignment* dari kepemilikan keluarga (Chen et al., 2010; Fan & Wong, 2002). Kedua argumen efek *entrenchment* dan *allignment* dari kepemilikan terkonsentrasi pada pihak keluarga ini nantinya akan meningkatkan biaya maupun manfaat dari melakukan kegiatan ekspropriasi seperti manajemen pajak agresif (Chen et al., 2010).

Koneksi Politik

Penelitian Faccio (2006) menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan perusahaan publik di 35 negara dari total 47 negara dalam penelitian untuk membina koneksi politik. Hal ini disebabkan karena koneksi politik dapat digunakan perusahaan untuk mengakomodir berbagai kepentingan perusahaan termasuk di dalamnya kepentingan terkait perpajakan perusahaan (La Porta et al., 2000). Koneksi politik dalam berbagai penelitian sebelumnya (Faccio 2006; Chaney, Faccio, & Parsley 2011; Muttakin et al. 2015) diartikan sebagai kondisi dimana petinggi perusahaan baik itu dewan dan/atau anggota manajemen kunci perusahaan lainnya atau juga pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham blok perusahaan memiliki jabatan atau kedekatan dengan pihak-pihak yang secara aktif terlibat dalam pemerintahan.

Koneksi politik yang dibina perusahaan mampu mempengaruhi perusahaan secara dua arah. Pada arah pertama, sesuai degan *political power theory* yang diajukan oleh Siegfried (1972) ditemukan bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan menggunakan kedekatan yang dimiliki untuk mendapatkan manfaat yang tersedia di pasar. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Muttakin et al. (2015) yang mengatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan menggunakan kedekatannya dengan politisi dan aparatur negara untuk memperoleh manfaat di pasar dan menghindari kemungkinan terkena hukuman dari kegiatan ekspropriasi dan manajemen yang buruk. Oleh karena itu, perusahaan dengan koneksi politik akan cenderung lebih terlibat pada kegiatan ekspropriasi dan memiliki tingkat manajemen yang kurang baik.

Pada arah sebaliknya, Chaney, Faccio, and Parsley (2011) juga menyebutkan bahwa pada beberapa kasus koneksi politik justru dapat meningkatkan pengawasan dalam perusahaan. Dalam penelitiannya, Chaney, Faccio, & Parsley (2011) menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung akan lebih dipantau oleh pemerintah dan pihak ketiga. Adanya pengawasan yang lebih ekstensif akan membuat perusahaan-perusahaan

dengan koneksi politik cenderung menghindari kegiatan berisiko dan ekspropriasi serta meningkatkan kualitas manajemen perusahaan.

Pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, manfaat dari membangun koneksi politik menjadi jauh lebih besar karena pemegang saham mayoritas dapat menggunakan koneksi politik yang ia miliki untuk menghindari hukuman dari kegiatan ekspropriasi. Terlebih, apabila konsentrasi kepemilikan ini dimiliki oleh pihak keluarga. Penelitian Morck, Stangeland, and Yeung (2000) menemukan kecenderungan pihak keluarga untuk membangun koneksi politik. Dari sini, terlihat adanya hubungan erat antara kepemilikan pihak keluarga dengan koneksi politik perusahaan yang dapat mempengaruhi perilaku perusahaan termasuk diantaranya perilaku perpajakan perusahaan.

Agresivitas Pajak

Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH dalam Gunadi (2012) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dimana atas iuran tersebut tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung. Tidak adanya kontraprestasi langsung pajak menyebabkan perusahaan cenderung melakukan pengelolaan dalam rangka menghemat atau memperkecil pajak. Pada dasarnya, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghemat atau memperkecil pajaknya. Cara pertama ialah melalui manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan usaha yang menyeluruh yang dilakukan dalam suatu perusahaan atau organisasi agar pajak dari perusahaan tersebut dapat dikelola secara efesien dan ekonomis. Manajemen pajak dilakukan dengan cara yang legal menurut peraturan perundang-undangan (Pohan, 2015). Hal ini berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan upaya rekayasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan demi meminimalkan beban pajak. Meski demikian, dalam praktiknya perbedaan antara manajemen pajak dan *tax evasion* menjadi tidak jelas karena sering kali Wajib Pajak yang awalnya hanya ingin melakukan manajemen pajak secara tidak sadar menjadi melakukan kegiatan *tax evasion* (Pohan, 2015). Semakin banyak cara yang dilakukan perusaah dalam meminimalkan beban pajaknya, semakin agresif pula manajemen perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pada dasarnya, keputusan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak tergantung dari pertimbangan biaya (*cost)* dan manfaat (*benefit)* yang didapat perusahaan dari melakukan kegiatan ini. Pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga, manfaat dan biaya dari melakukan perencanaan pajak agresif menjadi lebih tinggi. Dari segi manfaat, pihak keluarga akan mendapat porsi yang lebih besar dari 'tabungan' hasil kegiatan manajemen pajak agresif (Chen et al., 2010). Namun, sesuai yang disebutkan dalam penelitian Cheng (2014), pihak keluarga memiliki jangka waktu investasi dan keperdulian terhadap reputasi perusahaan yang lebih besar sehingga kegiatan manajemen pajak agresif akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi di perusahaan keluarga. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan biaya dan manfaat dari melakukan kegiatan pajak agresif di perusahaan keluarga, sehingga pertimbangan perusahaan untuk melakukan kegiatan manajemen pajak agresif lebih kompleks pada perusahaan keluarga. Selain itu, pihak keluarga memiliki kecenderungan untuk membangun koneksi politik (Morck, Stangeland, & Yeung 2000). Hal ini tentunya sejalan dengan argumen Siegfried (1972) memberikan implikasi tersendiri terhadap perpajakan perusahaan, mengingat koneksi politik ini dapat digunakan oleh pihak keluarga untuk mengurangi risiko deteksi dari otoritas yang berwenang (Muttakin et al., 2015; Sari, 2010).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak

Di Indonesia mayoritas pola kepemilikan yang terbentuk adalah pola kepemilikan terkonsentrasi pada pihak keluarga yang diperoleh melalui rantai kepemilikan dengan keluarga sebagai pihak pengendali (Claessens, Djankov, & Lang, 2000; Diyanty, 2012). Kepemilikan terkonsentrasi yang didapat melalui mekanisme piramida akan menyebabkan perbedaan antara hak arus kas dan hak kendali pemegang saham, dimana hak arus kas yang menggambarkan risiko finansial pemegang saham dalam perusahaan cenderung lebih kecil dibanding hak suara. Hal ini meningkatkan insentif pihak keluarga untuk melakukan kegiatan ekspropriasi. Meski demikian, kepemilikan oleh pihak keluarga juga menyebabkan terjadi kenaikan biaya dari kegiatan manajemen pajak agresif, Chen et al. (2010) juga menjelaskan kenaikan biaya ini muncul dari fitur unik pihak keluarga yang menyebabkan meningkatnya keperdulian pihak keluarga atas isu-isu jangka panjang.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Sari (2010) dan Masripah (2014). Hasil penelitian Masripah (2014) ini sejalan dengan penelitian Chen et al. (2010) yang menemukan bahwa kenaikan biaya dari kegiatan manajemen pajak agresif lebih besar dibanding kenaikan manfaat yang diterima perusahaan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Badertscher, Sharon, & Rego (2013) yang melakukan penelitian serupa di Brazil.

Masripah (2014) menyebutkan beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini antara lain salah satunya melalui argumen yang dikemukakan oleh Badertscher, Sharon, & Rego (2013) bahwa pada kepemilikan yang terkonsentrasi pada suatu pihak akan terdapat kecenderungan pembuatan keputusan terpusat pada segelintir pihak, dalam kasus ini yaitu pihak keluarga. Pihak keluarga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki karakteristik unik yaitu tingginya keperdulian terhadap nama baik dan reputasi perusahaan (Cheng, 2014). Hal ini membuat pihak keluarga menjadi lebih *risk averse* dibanding pemegang saham lainnya. Sikap yang lebih *risk averse* dicerminkan salah satunya melalui upaya pihak keluarga sebagai pengendali dalam mengarahkan kebijakan perusahaan yang menjauhi kegiatan manajemen pajak agresif yang dapat merusak reputasi perusahaan. Dari argumen ini, terlihat bahwa kepemilikan keluarga mempengaruhi tindakan manajemen pajak agresif perusahaan dimana perusahaan yang dimiliki oleh pihak keluarga atau yang lebih dikenal sebagai perusahaan keluarga akan cenderung kurang agresif dalam manajemen perpajakannya. Oleh karena itu, hipotesa pertama dari penelitian ini adalah:

H_1: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan

Pengaruh Moderasi Koneksi Politik

Indonesia memiliki pola kepemilikan terkonsentrasi dengan pengendalian utama terletak pada pihak keluarga (Claessens et al., 2000; Diyanty, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Morck, Stangeland, & Yeung, 2000) disebutkan bahwa perusahaan keluarga cenderung membangun koneksi politik. Selain itu, Indonesia juga memenuhi klasifikasi negara yang akan memberikan manfaat tinggi dari membina koneksi politik dalam penelitian Muttakin et al. (2015) yaitu negara dengan fitur kelembagaan seperti tingkat perlindungan investor yang lemah dengan kualitas pemerintahan yang rendah dan kurangnya kebebasan pers serta transparansi finansial. Adanya fitur-fitur ini akan membuat pihak keluarga semakin termotivasi untuk membina koneksi politik.

Koneksi politik dalam perusahaan dibina dengan motivasi untuk memperkuat posisi perusahaan dan *bargaining power* perusahaan terhadap pemerintah (Badertscher, Sharon, & Rego, 2013; Cheng, 2014; Chaney, Faccio, & Parsley, 2011). Koneksi politik yang dimiliki perusahaan dapat digunakan perusahaan untuk lebih terlibat dalam kegiatan manajemen pajak agresif, namun di sisi lain adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan justru dapat menimbulkan biaya yang semakin besar dari kegiatan manajemen pajak agresif.

Berdasarkan *political power theory*, diajukan oleh Siegfried (1972) ditemukan bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan menggunakan kedekatan yang dimiliki untuk mendapatkan manfaat yang tersedia di pasar. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Muttakin et al. (2015) yang mengatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan menggunakan kedekatannya dengan politisi dan aparatur negara untuk memperoleh manfaat di pasar dan menghindari kemungkinan terkena hukuman dari kegiatan ekspropriasi dan manajemen yang buruk.

Namun demikian, pada arah sebaliknya, Chaney, Faccio, dan Parsley (2011) menjelaskan bahwa koneksi politik dalam perusahaan juga dapat membuat perusahaan lebih menghindari terlibat dalam kegiatan berisiko seperti kegiatan manajemen pajak agresif. Chaney, Faccio, dan Parsley (2011) menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari pihak ketiga seperti regulator, pers, dan masyarakat. Hal ini membuat perusahaan dengan koneksi politik menjadi tidak dapat bebas dan cenderung memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan berisiko.

Dari argumen diatas, terlihat bahwa koneksi politik dapat memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak perusahaan secara dua arah sehingga dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H_2: Koneksi politik yang dimiliki perusahaan memperkuat (memperlemah) pengaruh dari kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Metoda Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2013. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal penelusuran kepemilikan akhir perusahaan dari penelitian Diyanty (2012) dan Departemen Hukum dan Kehakiman RI serta *database* Kementrian Hukum dan HAM RI, laporan keuangan dan laporan tahunan yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, situs perusahaan yang bersangkutan, database Thomson Reuters Eikon serta sumber publikasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel yaitu semua perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode Januari 2010 hingga Desember

2013 dan memiliki seluruh data yang dibutuhkan dalam pengukuran penelitian ini kecuali perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan yang pendapatannya dikenai pajak final. Dari kriteria ini diperoleh 164 perusahaan pertahun atau 656 perusahaan dalam empat tahun.

Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan yang *listed* di BEI periode Januari 2010 sampai Desember 2013	413
Perusahaan yang termasuk dalam sektor finansial	(69)
Perusahaan yang penghasilannya merupakan objek pajak final	(51)
Perusahaan yang *delisting* selama periode penelitian	(28)
Perusahaan yang menggunakan mata uang selain IDR	(48)
Perusahaan dengan ekuitas negatif	(17)
Perusahaan yang datanya tidak lengkap	(21)
Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan selain di 31 Desember	(3)
Perusahaan dengan nilai ETR dan CETR besar dari 1	(12)
Jumlah sampel perusahaan	164
Waktu observasi penelitian (2010 -2013)	x4
Total Sampel Penelitian (Balanced Panel)	**656**

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berikut penjelasan mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 1). Data struktur kepemilikan perusahaan diperoleh dengan penelusuran kepemilikan akhir perusahaan dari penelitian Diyanty (2012) dan Departemen Hukum dan Kehakiman RI serta *database* Kementrian Hukum dan HAM RI. 2) Data untuk mengukur proksi agresivitas pajak perusahaan diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, situs perusahaan yang bersangkutan, database Thomson Reuters Eikon serta sumber publikasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 3) Data untuk mengukur proksi koneksi politik didapatkan melalui analisis terhadap susunan direksi/petinggi perusahaan yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan terhadap publikasi media massa dan portal berita baik *online* maupun *non-online.*

Model Penelitian

Dalam rangka melihat bagaimana pengaruh dari efek kepemilikan keluarga terhadap perilaku manajemen pajak agresif perusahaan serta bagaimana koneksi politik yang dimiliki perusahaan dapat memoderasi hubungan dari kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak, maka dibentuklah model-model yang diharapkan dapat menggambarkan hubungan tersebut. Model-model tersebut dapat dilihat pada formula di bawah ini:
Model penelitian pertama:

$$\text{Tax Aggr} = \beta_0+\beta_1\text{FamOwn}_{it}+\beta_2\text{Polcon}_{it}+\beta_3\text{ROA}_{it}+ \beta_4\text{LEV}_{it}+ \beta_5\text{PPE}_{it} + \beta_6\text{Size}_{it} + \beta_7\text{MB}_{it}+ \varepsilon_i$$

Model penelitian kedua:

$$\text{Tax Aggr} = \beta_0+\beta_1\text{FamOwn}_{it}+\beta_2\,\text{Polcon}_{it}+ \beta_3\text{FamOwn*Polcon}+\beta_4\text{ROA}_{it}+ \beta_5\text{LEV}_{it}+ \beta_6\text{PPE}_{it} + \beta_7\text{Size}_{it} + \beta_8\text{MB}_{it}+\varepsilon_i$$

Operasionalisasi Variabel

Keterangan dari masing-masing variabel pada seluruh model diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Operasionalisasi Variabel

Jenis Variabel	Prediksi	Penjelasan
Variabel Dependen:		
Tax Aggr : yaitu tingkat agresivitas pajak perusahaan yang diukur melalui dua pendekatan yaitu *effective tax rate* (ETR) dan *current effective tax rate* (CETR).		
ETR		Merupakan perbandingan antara beban pajak pada periode t dengan laba sebelum pajak tahun t. Nilai ETR yang semakin kecil menunjukkan tindakan agresivitas pajak yang semakin besar, Hanlon dan Heitzman (2010).
CETR		Merupakan perbandingan antara beban pajak kini perusahaan pada periode t dengan laba sebelum pajak tahun t. NilaiC ETR yang semakin kecil menunjukkan tindakan agresivitas pajak yang semakin besar, Hanlon dan Heitzman (2010)
Variabel Bebas		
FamOwn	+	Merupakan variabel *dummy* yang bernilai 1 bila pihak keluarga memiliki hak suara pengendali akhir /ultimat pengendali terbesar *di perusahaan atau paling rendah sebesar 20% sesuai proksi penelitian Diyanty (2012).
Variabel Moderasi		
Polcon	+/-	Menunjukkan ada tidaknya koneksi politik yang dimiliki perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik apabila sedikitnya seorang anggota pimpinan perusahaan, pemegang saham mayoritas, pemegang saham blok (yang memiliki saham diatas 20%) atau kerabat dekat pihak yang disebutkan sebelumnya sedang atau pernah menjabat sebagai anggota parlemen, petinggi negara, atau pengurus partai yang menjadi perwakilan dalam parlemen kecuali TNI, ABRI, POLRI. Kriteria yang diatas mengacu pada modifikasi kritea pada penelitian Faccio (2006); Channey *et al*., (2011); dan Winata (2014). Merupakan variable *dummy* yang bernilai 1 bila memiliki koneksi politik dan bernilai 0 bila sebaliknya.
Variabel Kontrol		
ROA	+	Rasio yang menggambarkan profitabilitas perusahaan diukur dengan cara membandingkan pendapatan sebelum pajak perusahaan terhadap total aset awal tahun perusahaan, Anderson & Reeb (2003), Chen *et al* (2010), serta Khurana & Moser (2009)
LEV	-	Rasio yang menggambarkan tingkat utang perusahaan terhadap total aset perusahaan di awal tahun, Chen *et al*.,(2010), Martinez & Ramalho (2014), serta Khurana & Moser (2009)
PPE	-	Rasio yang menggambarkan keputusan investasi perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi jumlah aset tetap terhadap total aset awal tahun perusahaan, Manzo & Plesko (2002), Chen *et al*.,(2010), dan Mc. Guire *et al*.,(2011).
MB	-	Rasio nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku ekuitas yang menggambarkan ukuran perusahaan, Khurana & Moser (2009)
Size	+/-	Menggambarkan ukuran perusahaan. Diukur melalui logaritma natural dari nilai pasar ekuitas pada awal tahun, (Richardson & Lanis, 2007).

*merupakan persentasi hak kendali akhir terbesar melalui penelusuran hak kendali sampai dengan pengendali akhir/ultimate

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian ini ditunjukkan oleh Tabel 3. Dari sini terlihat bahwa nilai ETR dan CETR perusahaan dalam sampel masih dibawah tarif pajak *statutory* Indonesia yaitu sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam sampel kemungkinan melakukan kegiatan manajemen pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajaknya. Selain itu, terlihat sebaran data yang cukup tinggi untuk ETR dan CETR yang dapat dilihat dari nilai standar deviasi yang mencapai 12% dan 14% yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat manajemen pajak yang dilakukan perusahaan dalam sampel. Hal penting lainnya yang dapat dilihat dari statistik deskriptif data penelitian yaitu sebesar 80,33% perusahaan dalam sampel adalah perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dalam penelitian ini dan 35% perusahaan dalam sampel membangun koneksi politik.

Tabel 4 menggambarkan deskripsi dari kepemilikan keluarga dan koneksi politik. Dari data deskriptif pada Tabel 4 terlihat bahwa di Indonesia besar hak suara dengan hak arus kas cenderung berbeda sebesar tiga persen akibat adanya struktur kepemilikan piramida. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diyanty (2012) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan piramida di Indonesia menyebabkan terjadinya perbedaan antara hak suara dengan hak arus kas, dimana hak suara pemegang saham menjadi lebih besar. Tabel 4 juga menunjukkan bahwa dari sebesar 35% perusahaan yang membangun koneksi politik 27,5% diantaranya merupakan perusahaan

keluarga. Hal ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan hasil penelitian Morck, Stangeland, and Yeung (2000) yang menyebutkan bahwa terdapat kecenderungan perusahaan keluarga dalam membangun koneksi politik.

Pada Tabel 4 terlihat pula kecenderungan perusahaan dalam sampel dalam membina koneksi politik. Dari hasil deskripsi statistik sebanyak 12% perusahaan keluarga dalam sampel penelitian membina koneksi politik. Selain itu, dari total 35% perusahaan dengan koneksi politik dalam sampel, sebesar 27,5% diantaranya merupakan perusahaan keluarga. Hal ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan penelitian Morck, Stangeland, and Yeung (2000) yang menyatakan terdapat kecenderungan pihak keluarga untuk membina koneksi politik. Koneksi politik ini dapat digunakan pihak keluarga untuk mengurangi risiko deteksi dari kegiatan berisiko yang dilakukan oleh perusahaan dan mengakomodir kebutuhan perusahaan lainnya termasuk terkait perpajakan perusahaan.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Mean	Median	Std Dev	Min	Max	Skewness
ETR	656	0,232782	0,244411	0,126652	0	0,870308	0,78186
CETR	656	0,213285	0,235661	0,141981	0	0,94427	0,701836
ROA	656	0,119017	0,103714	0,130689	-0,6192	0,686436	0,734825
LEV	656	0,112541	0,046724	0,145635	0	0,598194	1,433918
PPE	656	0,420431	0,393857	0,258855	0,000112	1,36945	0,430758
SIZE	656	5.421.408	6.757.12,1	10.904.032	5.624	40.492.539	2,466543
MB	656	0,001913	0,001159	0,001864	0	0,008239	1,756723
Variabel Dummy							
Variabel	**N**		**% Nilai 1**		**% Nilai 0**		**Total**
Polcon	656		35,06%		64,94%		100,00%
FamOwn	656		80,33%		19,67%		100,00%

ETR= effective tax rate yang diukur melalui rasio antara total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak; CETR= current effective tax rate yang diukur melalui rasio antara total beban pajak kini perusahaan dengan laba perusahaan; FamOwn= Variabel dummy yang bernilai 1 bila perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga hak suara terbesar atau paling rendah 20% dalam perusahaan sesuai dengan penelitian Diyanty (2012); ROA = Tingkat profitabilitas (laba sebelum pajak dibagi dengan total aset tahun sebelumnya); LEV = Tingkat leverage (diukur dengan rasio total hutang jangka panjang terhadap total aset perusahaan tahun sebelumnya); PPE= Ukuran perusahaan yang diukur melalui rasio property, plant, & equipment terhadap aset tahun lalu perusahaan; SIZE= Ukuran perusahaan yang dihitung dari total aset perusahaan dibagi dengan nilai ekuitas perusahaan di awal tahun (dalam ribuan rupiah); MB= Market to book ratio yang dihitung dengan membagi nilai pasar ekuitas perusahaan dengan nilai bukunya; Polcon=Variabel dummy yang menunjukkan ada tidaknya koneksi politik yang dibina perusahaan (bernilai 1 bila perusahaan membangun koneksi politik dan 0 bila tidak) sesuai dengan model penelitian Faccio (2006), Chaney et al. (2011), dan Winata (2014).

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2016)

Tabel 4. Statistik Deskriptif Persentase Kepemilikan Keluarga dan Koneksi Politik Dalam Sampel

Description	Average				
	2010	2011	2012	2013	Total Average
CFR-FamOwn (%)	26,69%	27,12%	27,23%	26,46%	26,88%
CR-FamOwn (%)	29,80%	30,23%	30,47%	30,23%	30,18%
FamOwn with Polcon	12,33%	12,33%	11,76%	11,57%	12,00%
Polcon Own by FamOwn (%)	28,26%	28,26%	26,95%	26,52%	27,50%

CFR-FamOwn menunjukkan besar arus kas rata-rata yang dimiliki oleh pihak keluarga dalam perusahaan yang menjadi sampel penelitian; CR-FamOwn merupakan besar arus suara rata-rata pihak keluarga pada perusahaan dalam sampel penelitian ini; FamOwn with Polcon menggambarkan total persentase perusahaan keluarga yang memiliki koneksi politik, sedangkan Polcon own by FamOwn menunjukkan total koneksi politik yang dimiliki oleh pihak keluarga dari total seluruh perusahaan dalam sampel.

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2016)

Tabel 5 menggambarkan deskripsi statistik dari moderasi koneksi politik terhadap hubungan dari kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. Dari hasil statistik deskriptif, terlihat bahwa perusahaan keluarga tanpa hubungan politik akan memiliki nilai ETR yang lebih tinggi namun nilai CETR yang lebih rendah. Selain itu bila ditinjau melalui proksi ETR, perusahaan keluarga dengan hubungan politik akan cenderung menjadi lebih kurang agresif dalam kegiatan manajemen pajaknya. Namun, bila ditinjau melalui proksi CETR perusahaan keluarga

dengan koneksi politik justru akan lebih agresif dalam melakukan kegiatan manajemen perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga yang membangun koneksi politik cenderung kurang agresif dalam melakukan kegiatan manajemen pajak agresif melalui penggunaan perbedaan pajak permanen. Namun demikian, bila agresivitas pajak diukur menggunakan proksi CETR maka terlihat bahwa terdapat kecenderungan pihak keluarga yang membangun koneksi politik untuk melakukan kegiatan pajak agresif atau dengan kata lain koneksi politik yang dimiliki oleh pihak keluarga akan memperlemah pengaruh negatif dari kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Pengaruh Moderasi Koneksi Politik

Deskripsi	Rata-rata nilai	
	ETR	CETR
FamOwn Firm	23,90%	21,40%
Non-FamOwn Firm	20,72%	21,04%
Polcon Firm	23,64%	22,34%
Non-Polcon Firm	23,08%	20,78%
FamOwn with polcon	23,93%	21,34%
FamOwn without polcon firm	23,89%	21,42%

FamOwn Firm menunjukkan perusahaan dengan kepemilikan keluarga menurut modifikasi definisi kepemilikan keluarga berdasarkan Martinez dan Ramalho (2014), sedangkan Non-FamOwn Firm sebaliknya. Polcon Firm menunjukkan perusahan dengan koneksi politik sesuai, sedangkan Non-Polcon Firm sebaliknya. FamOwn with polcon menggambarkan perusahaan keluarga yang juga memiliki koneksi politik, sedangkan FamOwn without polcon firm.

Sumber: Hasil olahan Penulis (2016)

Pemilihan Metode Estimasi

Data dalam penelitian ini diolah melalui *software* stata 12. Sebelum melakukan pengolahan regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mendapatkan data yang bersifat BLUE. Pengujian asumsi klasik untuk tes multikolinearitas dilaukan melalui uji VIF, sedangkan untuk pengujian autokorelasi dan heteroskedastisitas diuji melalui *wooldridge test* dan *wald test*. Seluruh data dalam penelitian ini sudah diuji dan dilakukan penanganan atas ketiga masalah diatas sehingga data sudah bersifat BLUE.

Analisa Hasil Pengujian

Hasil pengujian model penelitian pertama

Hasil pengujian model penelitian pertama dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan pengujian model pertama baik menggunakan proksi ETR maupun CETR ditemukan temuan bahwa kepemilikan keluarga pada perusahaan yang disimbolkan dengan FamOwn memiliki korelasi positif dengan ETR dan CETR. Artinya, perusahaan keluarga cenderung memiliki nilai ETR dan CETR yang lebih tinggi dibanding perusahaan non-keluarga. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan keluarga lebih kurang agresif dalam manajemen perpajakannya dibandingkan perusahaan non-keluarga. Hasil pengujian model ke-1 yang sesuai dengan dugaan awal penelitian dan hasil interpretasi pada bagian statistik deskriptif. Arah positif dari variabel kepemilikan keluarga (FamOwn) terhadap agresivitas pajak yang sesuai dengan hipotesa pertama dari penelitian ini sehingga hipotesa awal penelitian ini diterima.

Dalam penelitian Cheng (2014), ditemukan kecenderungan perusahaaan keluarga untuk menghindari kegiatan ekspropriasi yang dapat merusak nama dan reputasi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pihak keluarga memilki keunikan karakteristik investasi, dimana pihak keluarga cenderung memiliki investasi yang tidak terdiversifikasi dengan horizon waktu lebih tinggi dibanding investor lainnya (Cheng, 2014). Hal ini menyebabkan perusahaan keluarga lebih sensitif dengan isu jangka panjang seperti reputasi dan sebaginya. Selain itu, penelitian (Casson, 1999) juga menyebutkan bahwa pihak keluarga menganggap investasinya merupakan warisan atau kekayaan yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dengan demikian, pihak keluarga akan mencoba untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan adanya penurunan harga perusahaan (Casson, 1999) seperti kegiatan manajemen pajak agresif. Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak yaitu penelitian Chen et al. (2010); Badertscher, Sharon, and Rego (2013); Masripah (2014). Dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini diterima.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Model 1

Model 1:

$$TaxAgg=\beta_0+\beta_1 FamOwn_{it}+\beta_2 Polcon_{it}+\beta_3 ROA_{it}+\beta_4 LEV_{it}+\beta_5 PPE_{it}+\beta_6 Size_{it}+\beta_7 MB_{it}+\epsilon_i$$

Hipotesisyang diuji:

H1: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Proksi ETR : Prob. F = 0,0000; Adj R-Squared=0,069; R-Squared within=0,0097; R-Square overall = 0,0006

Proksi CETR: Prob. F = 0,0000; Adj R-Squared=0,1038; R-Square within=0,0257; R-squared overall=0,0300

Variabel	Prediksi Tanda	ETR			CETR		
		Koef	Prob	VIF	Koef	Prob	VIF
Konstanta		0,214935	0,000		0,22126	0.000	
FamOwn	(-)	0,019509	0,000***	3,38	0.01217	0.006***	3,38
Polcon	(+/-)	0,015675	0,000***	1,51	0.02388	0.000***	1,51
ROA	(+)	0,138117	0,000***	2,04	0.24058	0.000***	2,04
LEV	(-)	-0,045317	0,002***	1,94	-0.09197	0.000***	1,94
PPE	(-)	0,011057	0,066 *	3,71	-0.0233	0.005***	3,71
MB	(-)	-6,14162	0,000***	2,45	-15.080	0.000***	2,45
Size	(+/-)	-0,0042	0,000***	1,94	0.01255	0.229	1,94

Keterangan Tabel:

ETR= effective tax rate yang diukur melalui rasio antara total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak; CETR= current effective tax rate yang diukur melalui rasio antara total beban pajak kini perusahaan dengan laba perusahaan; FamOwn= Variabel dummy yang bernilai 1 bila perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga hak suara terbesar atau paling rendah 20% dalam perusahaan sesuai dengan penelitian Diyanty (2012); ROA = Tingkat profitabilitas (laba sebelum pajak dibagi dengan total aset tahun sebelumnya); LEV = Tingkat leverage (diukur dengan rasio total hutang jangka panjang terhadap total aset perusahaan tahun sebelumnya); PPE= Ukuran perusahaan yang diukur melalui rasio property, plant, & equipment terhadap aset tahun lalu perusahaan; SIZE= Ukuran perusahaan yang dihitung dari total aset perusahaan dibagi dengan nilai ekuitas perusahaan di awal tahun; MB= Market to book ratio yang dihitung dengan membagi nilai pasar ekuitas perusahaan dengan nilai bukunya; Polcon=Variabel dummy yang menunjukkan ada tidaknya hubungan politik yang dibina perusahaan (bernilai 1 bila perusahaan membangun hubungan politik dan 0 bila tidak) sesuai dengan model penelitian Faccio (2006), Chaney et al. (2011), dan Winata (2014).

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2016)

Hasil pengujian model penelitian kedua

Model kedua dalam penelitian ini berfungsi untuk menguji efek moderasi dari koneksi politik perusahaan terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak dengan menggunakan ETR sebagai proksi yang digunakan dalam mengukur agresivitas pajak. Hasil moderasi dari koneksi politik terhadap hubungan kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak dijelaskan melalui variabel FamOwn*Polcon. Dari hasil uji regresi terlihat bahwa variabel moderasi ini berkorelasi negatif dengan ETR dan CETR dimana perusahaan keluarga dengan koneksi politik akan cenderung memiliki nilai ETR dan CETR yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan keluarga tanpa koneksi politik dan perusahaan non-keluarga.

Hasil korelasi yang negatif ini sesuai dengan dugaan awal penelitian bahwa moderasi dari koneksi politik akan memperlemah (memperkuat) pengaruh dari kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak perusahaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa adanya moderasi koneksi politik akan membuat perusahaan keluarga cenderung menjadi lebih agresif dalam manajemen perpajakannya dibanding perusahaan keluarga yang tidak membangun koneksi politik. Hal ini sesuai dengan argumen *political power theory* yang diajukan Siegfried (1972). Selain itu, hasi ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan mengurangi risiko perusahaan terkena denda dan terdeteksinya kegiatan manajemen pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan seperti yang telah dijelaskan dalam penelitan Muttakin et al. (2015) dan Morck, Stangeland & Yeung (2000). Dengan adanya penurunan biaya dari melakukan aktivitas manajemen pajak agresif, maka pihak keluarga akan mendapatkan insentif untuk memaksimalkan pajak yang harus dibayar ke pemerintah, sehingga mendorong untuk terjadinya kegiatan manajemen pajak agresif. Hasil uji ini membuktikan bahwa hipotesis kedua penelitian ini diterima.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Model 2

Model 2:

Tax Agg=$\beta_0+\beta_1 FamOwn_{it}+\beta_2 Polcon_{it}+\beta_3 ROA_{it}+ \beta_4 LEV_{it}+ \beta_5 PPE_{it} + \beta_6 Size_{it} + \beta_7 MB_{it} + \beta_8 FamOwn*Polcon +\epsilon_i$

Hipotesisyang diuji:

H2: Koneksi politik yang dimiliki perusahaan memperkuat (memperlemah) pengaruh dari kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Proksi ETR : Prob. F = 0,0000; Adj- R Squared= 0,0738; R-Square within=0.0099; R-squared overall=0,0006

Proksi CETR : Prob. F = 0,0000; Adj-R Squared= 0,1118; R-Square within= 0,026; R-squared overall=0,030

Variabel	Prediksi Tanda	ETR			CETR		
		Koef	Prob	VIF	Koef	Prob	VIF
Konstanta		0.1901	0,000		0,18719	0,000	
FamOwn	(-)	0,0478	0,000***	4,53	0,04528	0,000***	4,53
Polcon	(+/-)	0,0498	0,000***	4,44	0,06634	0,000***	4,44
ROA	(+)	0,1286	0,000***	2,15	0,24004	0,000***	2,15
LEV	(-)	-0,0420	0,002***	1,94	-0,0902	0,000***	1,94
PPE	(-)	0,0083	0,242	3,93	-0,0207	0,012***	3,93
MB	(-)	-5.6994	0,000***	2,51	-13,476	0,000***	2,51
Size	(+/-)	-0,0046	0,000***	1,51	0,00032	0,742	1,51
FamOwn*Polcon	(+/-)	-0,04117	0,000***	3,54	-0,0547	0,000***	3,54

Keterangan Tabel:

ETR= effective tax rate yang diukur melalui rasio total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak; CETR= current effective tax rate yang diukur melalui rasio total beban pajak kini perusahaan dengan laba perusahaan; FamOwn= Variabel dummy yang bernilai 1 bila perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga; ROA = Tingkat profitabilitas (laba sebelum pajak dibagi dengan total aset tahun sebelumnya); LEV = Tingkat leverage (diukur dengan rasio total hutang jangka panjang terhadap total aset perusahaan tahun sebelumnya); PPE= Ukuran perusahaan yang diukur melalui rasio PPE terhadap aset tahun lalu perusahaan; SIZE= Ukuran perusahaan yang dihitung dari rasio total aset terhadap nilai ekuitas perusahaan; MB= Market to book ratio yang dihitung dengan membagi nilai pasar ekuitas perusahaan dengan nilai bukunya; Polcon=Variabel dummy yang menunjukkan ada tidaknya koneksi politik yang dibina perusahaan (bernilai 1 bila perusahaan membangun koneksi politik dan 0 bila tidak) sesuai dengan model penelitian Faccio (2006), Chaney et al. (2011), dan Winata (2014).

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2016)

Hasil Pengujian Variabel Kontrol

Variabel kontrol pertama yang diuji yaitu profitabilitas perusahaan (ROA). Perusahaan yang memiliki laba tinggi, harusnya membayar pajak yang lebih tinggi sehingga idealnya memiliki nilai ETR yang lebih tinggi. Hasil pengujian variabel kontrol pertama dalam penelitian ini yaitu ROA menunjukkan korelasi positif antara ROA dan ETR serta CETR. Hasil ini sesuai dengan dugaan awal penelitian dan hasil penelitian terdahulu oleh Anderson dan Reeb (2003); Chen et al. (2010), serta Khurana dan Moser (2009).

Variabel kontrol selanjutnya yaitu tingkat utang perusahaan. Perusahaan memanfaatkan utang yang dimiliki untuk mengurangi beban pajak penghasilan. Penelitian Chen et al. (2010); Martinez dan Ramalho (2014); serta Khurana dan Moser (2009) menemukan korelasi negatif antara tingkat utang dengan nilai ETR dan CETR. Hasil uji model pertama dan kedua untuk variabel tingkat utang ini sesuai dengan dugaan dan hasil penelitian sebelumnya yaitu tingkat utang perusahaan berhubungan negatif dengan nilai ETR dan CETR.

Variabel kontrol ketiga dalam penelitian ini adalah pertumbuhan (MB ratio). Perusahaan yang sedang bertumbuh memiliki kecenderungan untuk berinvestasi lebih besar dibanding perusahaan yang sudah mapan (McGuire, Wang, & Wilson, n.d.). Sehingga menurunkan nilai ETR dan CETR perusahaan. Argumen lainnya didapat dari penelitian Chen et al. (2010) yang mengatakan perusahaan yang sedang bertumbuh akan mendorong pemegang saham pengendali untuk melakukan penghemat pajak dan berinvestasi pada *tax-favored asset*. Hasil pengujian dari variabel ini menunjukkan hubungan negatif dengan ETR, hal ini sesuai dengan dugaan awal penelitian dan juga hasil penelitian terdahulu.

Variabel kontrol selanjutnya yaitu ukuran perusahaan (Size). Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar harusnya memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih tinggi sehingga membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil (Martinez & Ramalho, 2014; Jensen & Meckling, 1976; Chen et al., 2010). Namun demikian, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar juga memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk lebih terlibat dalam kegiatan manajemen pajak agresif. Hasil penelitian menggunakan variabel ETR untuk model ke-1 dan model ke-2 menunjukkan perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki nilai ETR yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung lebih agresif dalam melakukan kegiatan manajemen pajak. Hasil ini sesuai dengan *political power theory* yang dicetuskan oleh Siegfried (1972). Namun demikian, bila menggunakan CETR ditemukan tidak adanya hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan CETR.

Variabel independen terakhir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keputusan investasi perusahaan (PPE). Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa keputusan investasi perusahaan (PPE) harusnya berkorelasi negatif dengan manajemen pajak agresif. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian menggunakan proksi CETR dimana tingkat PPE perusahaan berkorelasi negatif dengan CETR perusahaan. Khurana dan Moser (2009) yang menyatakan bahwa tingkat PPE perusahaan dapat digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pembebanan yang intensif melalui depresiasi dan amortisasi yang lebih tinggi untuk keperluan pajak.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak dan bagaimana pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. Penelitian ini melakukan pengujian terhadap seluruh perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2013 dengan total sampel sebesar 656 perusahaan tahun. Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua model penelitian dan metode regresi. Variabel dependen penelitian ini, yaitu agresivitas pajak, diukur menggunakan dua proksi yaitu *effective tax rate* (ETR) dan *current effective tax rate* (CETR).

Model pertama dibentuk dalam rangka menguji pengaruh dari kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menduga bahwa kepemilikan keluarga akan menyebabkan perusahaan menjadi lebih tidak agresif dalam kegiatan manajemen pajak perusahaan karena adanya fitur unik keluarga seperti dalam Cheng (2014) yang menyebabkan biaya dari melakukan kegiatan manajemen pajak agresif menjadi lebih besar pada perusahaan keluarga. Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesa awal dari penelitian ini diterima saat agresivitas pajak perusahaan diukur menggunakan proksi ETR maupun CETR. Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chen et al. (2010); Masripah (2014); dan Badertscher, Sharon dan Rego (2013).

Model kedua penelitian dibentuk dalam rangka menguji pengaruh moderasi dari koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menduga bahwa koneksi politik dapat memperkuat (memperlemah) pengaruh dari kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koneksi politik yang dibina oleh pihak keluarga akan memperlemah pengaruh negatif dari kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak. Hal ini sesuai dengan *political power theory* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan cenderung menggunakan kedekatan yang dimiliki untuk mendapatkan manfaat-manfaat termasuk di dalamnya manfaat terkait perpajakan.

Keterbatasan dari penelitian ini antara lain adalah bahwa penelitian ini hanya menggunakan dua pengukuran agresivitas pajak dari total dua belas metode pengukuran yang dapat digunakan untuk mendeteksi agresivitas pajak menurut penelitian (Hanlon & Heitzman, 2010). Penelitian selanjutnya dapat menambahkan pengukuran lainnya sesuai penelitian (Hanlon & Heitzman, 2010). Selain itu, dalam pengukuran koneksi politik masih terdapat subjektivitas dikarenakan adanya keterbatasan informasi yang dapat digunakan dan bersifat andal yang dapat menyebabkan timbulnya kemungkinan perusahaan yang sebenarnya memiliki koneksi politik tidak terdeteksi dalam penelitian. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan definisi dari koneksi politik dengan menggunakan metode observasi dan wawancara untuk menemukan definisi yang lebih objektif mengenai koneksi politik.

Daftar Referensi

Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connection, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Theory*, *25*(5), 574–595.

Amir, H. (2014). *Potensi pajak dan kinerja pengumpulannya*. Jakarta. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pajak%20potensi%20dan%20pengumpulannya.pdf

Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). *Who Monitors the family?* (SSRN Scholarly Paper ID 369620). New

York. Retrieved from http://papers.ssrn.com

Ariffin, A. N. B., Nor, F. M., & McGowan, C. (2010). Pyramidal structure, firm capital structure exploitation and ultimate owners dominance. *International Review of Financial Analysis*, *19*, 151–164.

Badertscher, B., Sharon, K., & Rego, S. (2013). The separation of ownership and control and tax aviodance. *Journal of Accounting and Economics*, *56*(2), 228–250.

Bukart, M., Panurazi, F., & Shleifer, A. (2003). Family firm. *Journal of Finance*, *58*(5), 2167–2202.

Camey, R. W., & Child, T. B. (2013). Changes to the ownership and control of East Asian corporations between 1996 and 2008: The primacy of politics. *Journal of Finance and Economics*, *107*(2), 494–513.

Casson, M. (1999). The economics of family firms. *Scandinavian Economic History Review*, *47*(1). https://doi.org/10.1080/03585522.1999.10419802

Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically-connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, *51*((1–2)), 58–76.

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, *91*(1), 41–61.

Cheng, Q. (2014). Family firm research- A review. *Journal of Accounting and Research*, *7*(3), 149–163.

Chi, C. W., Hung, K., Cheng, H. W., & Lieu, P. T. (2014). Family firms and earning management in Taiwan : Influence of corporate governance. *International Review of Economics and Finance*, *36*, 88–98.

Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. (2000). The separation of ownership and control in East Asia. *Journal of Financial Economics*, *58*(1–2), 81–112.

Desai, M., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high –powered incentives. *Journal of Financial Economics*, *79*(1), 145–179.

Diyanty, V. (2012). *Pengaruh kepemilihan pengendali akhir terhadap transaksi pihak berelasi dan kualitas laba*. Universitas Indonesia, Depok.

Faccio, M. (2006). Politically-connected firms. *American Economic Review*, *96*(1), 369–386.

Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2002). Corporate ownership structure and the inforativeness of accounting earnings in East Asia. *Journal of Accounting and Economics*, *33*(3), 401–425.

Gomez-Meija, L., Haynes, K., Nunez-Nickel, M., Jacobson, K., & Moyano-Fuentes, J. (2007). Socioemotional weath and business risks in family-controlled firms: Evidence from spanish olive mills. *Administrative Science Quarterly*, *52*(1), 106–137.

Gunadi. (2012). *Akuntansi pajak*. Jakarta: Grasindo.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, *50*(2–3), 127–178.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costsand ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.

Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). Institutional ownership and tax aggressiveness. *AAA 2010 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper*. Diakses dari http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1464106

Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, *33*(1), 78–114.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. *Journal of Finance*, *54*(2), 471–517.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate. *Journal of Financial Economics*, *58*(1–2), 3–27.

Martinez, A. L., & Ramalho, G. C. (2014). Family firm and tax aggressiveness in Brazil. *International Business Research*, *7*(3), 129-136.

Masripah, M. (2014). *Pengaruh pemegang saham pengendali terhadap penghindaran pajak serta peran kepemilikan keluarga dan mekanisme tata kelola perusahaan sebagai variabel pemoderasi*. Universitas Indonesia.

McGuire, S. T., Wang, D., & Wilson, R. J. (n.d.). Dual class ownership and tax avoidance. In *American Taxation Association Midyear Meeting: JATA Conference*.

Morck, R., Stangeland, D., & Yeung, B. (2000). *Inherited wealth, corporate control, and economic growth: The Canadian disease*. University of Chicago Press.

Muttakin, M. B., Monem, R. M., Khan, A., & Subramaniam, A. (2015). Family firm, firm performace and political connections: Evidence from Bangladesh. *Journal of Accounting and Economics*, *11*(3), 215–223.

Pohan, C. A. (2015). *Manajemen perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Karakteristik kepemilikan perusahaan, coroporate governance, dan tindakan pajak agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*.

Shackelford, D. A., & Sheclin, T. (2001). Empirical tax research in accounting. *Journal of Accounting an Economics*, *31*(1–3), 321–387.

Sheleifer, A., & Vishny, R. (1997). A survey of corporate governance. *Quarterly Journal of Economics*, *109*(4), 995–1025.

Siegfried, J. J. (1973). The relationship between economic structure and the effect of political influence : empirical evidence from the Federal Corporation Income Tax Program. Ph.D. dissertation. University of Wisconsin.

Winata, F. (2014). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013. *Tax and Accounting Review*, *4*(1), 1-11.

Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits, and firm perfomance. *Journal of Accounting and Public Policy*, *31*(3), 277–300.